

# WACANA PUBLIK KEUANGAN ISLAM DI SUMATERA BARAT

**Delmus Puneri Salim dan Lies Kryati**

IAIN Manado

Email: delmus.salim@gmail.com

***Abstract:** This paper demonstrates how the Islamic financial system has been shaped by, and come to reflect, broader socio-cultural, political and economic developments such as the 1997 economic crisis in Indonesia and increases in oil welfare from Middle Eastern countries. The paper argues that a complex system of socio-economic pressures and financial systems at the regional, national and transnational levels has enabled the regional governments to engage in Islamic financial system. The paper suggests that the involvement was driven by the capacity to distribute resources to large sections of the population through small business groups provided a useful mechanism for shoring up electoral support. It is also argues that the present of a robust Islamic banking system was vital to the regional governments attempts to source additional financial resources from the Islamic world that could be used to fund local development.*

***Keywords:** Islamic Financial, Politics, Public Issue.*

## PENDAHULUAN

Dengan lebih dari 500 lembaga keuangan Islam di 75 negara, keuangan Islam telah meningkat dalam hal signifikansi dan fungsi sebagai sebuah pasar yang berkembang dalam komunitas Islam regional dan transnasional. Jumlah aset dalam sistem keuangan Islam di seluruh dunia adalah \$1 trilyun AS, atau setara dengan 4 persen ekonomi global pada tahun 2008 (ABC online 20 November 2008), meningkat dari \$700 juta AS pada tahun 2007. Terlebih lagi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10 persen, sistem keuangan Islam ini berkembang lebih cepat daripada perbankan konvensional. Sebanyak 36 persen pasar bagi semua produk keuangan

Islam berada di negara-negara Timur Tengah, dan 35 persen berada di negara Asia dan Afrika.

Di Indonesia, keuangan Islam telah dilembagakan sejak akhir masa Orde Baru, melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, peresmian perbankan sistem ganda pada tahun 1998 dan menyusul pengesahan Undang-undang Perbankan Islam pada tahun 2008. Walaupun pada awalnya kecil, keuangan Islam di Indonesia sekarang menjadi bagian penting dalam strategi nasional dan regional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar global. Bersama dengan system bank konvensional, Indonesia telah

berusaha membangun sebuah model sistem keuangan Islam yang telah terhubung dengan proyek-proyek pembangunan dan reformasi social dan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu pada umumnya memandang keuangan Islam sebagai sebuah hasil interaksi simbolis dengan Barat dan karena itu menganggap pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam sebagai cerminan identitas Islam (Kuran, 1997). Penelitian-penelitian keuangan Islam di Indonesia juga menunjukkan bahwa pertumbuhan mekanisme keuangan Islam merupakan bentuk kritikan terhadap perbankan konvensional Barat setelah krisis ekonomi 1997 (Lubis, 2004) dan keberhasilan keuangan Islam di negara-negara Islam lainnya (Saeed, 1999; Lubis, 2004). Tetapi, para pengkritik juga menunjukkan bahwa keuangan Islam sangat pragmatis (Saeed, 2004), dan memiliki kadar kesamaan yang tinggi dengan perbankan konvensional (Kuran, 1995).

Tulisan ini menggambarkan situasi perkembangan keuangan Islam di Sumatera Barat sejak krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia dan peningkatan ekonomi yang bersumber dari minyak bumi di negara-negara Timur Tengah. Tulisan ini menunjukkan bagaimana wacana keuangan Islam digambarkan dalam analisa hubungan pasar yang diciptakan

oleh keberhasilan pertumbuhan keuangan Islam di negara-negara Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini mencoba untuk membangun, tetapi, melampaui pendekatan agama, politik dan legal dalam rangka untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan keuangan Islam di Sumatera Barat. Untuk itu, makalah ini didasarkan pada metodologi yang berhubungan dengan disiplin sosiologi, sejarah, dan bahasa, dalam pendekatan yang lebih dekat dengan kategori politik sosiologi kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat karena Sumatera Barat memiliki populasi mayoritas Islam dan telah mengimplementasikan regulasi tentang Islam lebih banyak dari daerah lain di Indonesia. Dengan memiliki jumlah penduduk sebesar 4,5 juta (BPS 2011), budaya Minangkabau adalah matrilineal dimana tanah dan rumah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki terkenal dengan budaya merantau. Sejak lama, orang Minangkabau menikah dengan para pedagang dan pejalan yang melewati Sumatera Barat dari India dan Malaka yang memperjual belikan emas dan kopi pada jalur tersebut pada abad ke empat dan sembilan belas

(Summerfield, 1999: 31). Jalur pedagang ini telah memainkan peran yang penting dalam memperkenalkan Islam ke Sumatera Barat pada abad ke enam belas sampai abad ke delapan belas (Dobbin, 1983), yang kemudian membuat Islam menjadi identitas penting Minangkabau.

Hubungan antara Minangkabau dengan beberapa varian Islam telah ditandai dengan hubungan yang saling mengakomodasi dan pertentangan. Masjid menjadi bagian penting dalam sistem Nagari, sebuah sistem politik lokal sejak abad ke tujuh belas. Namun Minangkabau yang sudah mengenal Islam ini kemudian pernah memiliki tensi dengan Islam yang dibawa oleh pemuka agama pada awal abad ke sembilan belas. Hubungan Islam dan Minangkabau masih terus menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik Minangkabau sampai saat ini. Sejarah inilah yang membuat Sumatera Barat menjadi alasan yang menarik untuk meneliti wacana keuangan Islam di Sumatera barat.

Analisa dokumen dilakukan pada umumnya selama tiga tahun dari muatan berita lokal (2008-2010), yang memberikan gambaran baik presentasi Islam publik sebagai motivator kebijakan politik oleh politisi dan bagaimana tokoh masyarakat memanfaatkan agama Islam dalam proses politik tersebut.

Teks-teks dokumen tersebut dianalisa dalam rangka menunjukkan kontruksi politik, sosial dan agama yang dibuat ketika memunculkan dan memvalidasi peraturan-peraturan bernuansa Islam, dengan tujuan memahami cara-cara publik figure menggunakan bahasa agama untuk menjaga identitas Islam Minangkabau dan dalam waktu yang sama identitas minangkabau digerakkan untuk menjustifikasi penggunaan Islam sebagai argumen untuk mengenalkan kontrol sosial dalam bentuk-bentuk baru.

Analisa dilakukan dengan menggunakan tehnik yang berkaitan dengan kritik discourse analisis yang ingin menghasilkan pandangan bahwa wacana menghasilkan kembali atau melawan ketidakadilan sosial dan politik, penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi politik (Fairclough, 1995). Analisa empati, penggunaan kalimat methapor, dan pemilihan kata-kata tertentu, semua menunjukkan usaha publik figur untuk memposisikan diri mereka dalam praktek-praktek Islam di Sumatera Barat dan atau perlawanan terhadap proses tersebut. Teknik *over-wording* dan dan identifikasi eksperimen, ekspressif dan rasional *value* digunakan untuk mengkategorikan tema, ide, pandangan dan peran yang penting untuk memahami perjuangan

ideologi, opini, pemahaman, dan hubungan timbal balik (Fairclough, 1989: 112-115). Semua teknik ini digunakan untuk memahami klaim Islam sebagai justifikasi perkembangan keuangan Islam di Sumatera Barat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keuangan Islam di Indonesia**

Prinsip-prinsip sistem keuangan Islam bisa ditemukan dalam praktek keuangan tradisional di Indonesia. Verdasco (2006: 165) menyatakan praktek keuangan tradisional ijon pinjaman tanpa bunga bagi para petani di daerah pedesaan telah dipraktekkan bertahun-tahun di Indonesia. Menurut Verdasco juga, arisan, dimana para anggota menabung secara reguler dalam jumlah tertentu dan selanjutnya bisa meminjam tanpa bunga juga merupakan bagian dari praktek keuangan Islam dalam sistem keuangan tradisional di Indonesia.

Beberapa ilmuwan mengklaim institusi keuangan Islam pertama di Indonesia muncul berbarengan dengan pendirian Sarekat Dagang Islam, SDI pada tahun 1911 dalam usaha bersaing dengan para pedagang Tiongkok (Lubis 2004). Lebih ke depan, Koperasi Teknosa, di Bandung dan Ridho Gusti di Jakarta didirikan pada tahun 1980-an (Hefner, 1996) sedangkan organisasi Nahdatul Ulama

telah mendirikan kerjasama keuangan dengan pemilik Bank Summa pada tahun 1990 dalam mencoba mengoperasionalkan produk-produk ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam (Saeed 1999).

Indonesia secara formal mendirikan sistem perbankan Islam sedikit terlambat dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Pilipina yang mendirikan Amanah Bank Pilipina pada tahun 1973 (Ariff, 1988), dan Malaysia, dengan Bank Islam Malaysia Berhad, yang dibuka pada tahun 1983 (Billah, 2007). Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank Islam pertama di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992 yang disokong oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pemerintah Orde Baru yang dana awalnya dikumpulkan oleh mantan Presiden Suharto, Yayasan Amal bhakti Pancasila, dan Para konglomerat (Hefner, 1996). Aktifitas keuangan Islam yang berubah ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari kebijakan Suharto pada tahun 1980-an yang pada saat itu menolak permohonan untuk membuka pendirian perbankan Islam di Indonesia (Hefner, 1996; Lubis 2004).

Mekanisme hukum yang melandasi perubahan tersebut adalah hukum No. 7/1992 tentang perbankan yang

memperbolehkan operasional perbankan Islam, didukung oleh Kebijakan Pemerintah No. 72/1992 tentang perbankan yang membolehkan bank untuk menggunakan prinsip keuangan Islam bagi hasil dan tanpa riba. Beberapa tahun kemudian, diputuskan aturan hukum No. 10/1998 tentang perbankan yang membolehkan pendirian system bank ganda dimana sebuah bank konvensional bisa membuka bank Islam tanpa menjadi sebuah bank Islam secara keseluruhan. Bank Islam menurut peraturan tersebut adalah bank komersial tanpa bunga, kontrak kabur, spekulasi, atau fungsi lain yang dilarang prinsip keuangan Islam (Juoro, 2008). Satu tahun kemudian, Bank Indonesia diberikan kekuasaan untuk melaksanakan control keuangan aktifitas keuangan Islam melalui perubahan undang-undang No. 23/1999 dan biro Syariah ditambahkan dalam struktur Bank Indonesia.

Sejak saat itu, dua Bank Islam baru didirikan, yaitu Bank Syariah Mandiri tahun 1999 dan Bank Syariah Mega Mandiri tahun 2004. Sampai tahun tersebut, Bank Mandiri Syariah memiliki asset sebesar 5,2 trilyun rupiah yang pada tahun 2008 mencapai 13 trilyun rupiah. Sebagai tambahan, tahun 2009 telah muncul 133 Bank Perkreditan rakyat Syariah (BI, Islamic Banking Statistics February 2009).

Aset Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini sama dengan empat persen dari asset keseluruhan bank Perkreditan rakyat di Indonesia tahun 2007 (Juoro, 2008).

Pertumbuhan keuangan Islam ini telah mempercepat bank konvensional untuk membuka unit Bank Islam pada saat itu. Bank konvensional pertama yang mendirikan unit Bank Islam adalah Bank IFI tahun 1999, diikuti oleh BNI dan Bank Jabar tahun 2000 (BI, 2003). Pada September 2008, telah ada 28 Bank Konvensional dengan Unit Bank Islam (BI, 2009). Secara keseluruhan, institusi keuangan Islam ini telah mempekerjakan dua belas ribu pegawai di 581 kantor bank Islam, 24 unit Bank Islam, dan 202 Bank Perkreditan Rakyat Syariah seluruh Indonesia (BI 2009).

Dukungan terhadap keuangan Islam kembali menguat pada tahun 2008 ketika terjadi krisis keuangan global, dimana, penjualan uang sertifikat Bank Konvensional menurun secara drastic dan sertifikat uang syariah mencapai kenaikan nilai menjadi 5,5 trilyun rupiah (BI Banking Statistics March 2009) atau 650 milyar US Dollars dalam asetnya (*Jakarta Post* 17 April 2009). Kemunculan sertifikat uang syariah yang belum termasuk dalam pembahasan undang-undang perbankan Islam tahun 2008 adalah inisiatif Bank Indonesia yang diperkenalkan tahun 2009. Pada tahun

2011, terdapat 11 bank Islam, 23 unit Bank Islam dan 154 bank Perkrediran Rakyat Syariah di Indonesia (BI Islamic Banking Statistics October, 2011).

Terlepas dari perkembangan aset bank Islam, perbankan Islam masih mempunyai peran yang masih kecil dalam aktifitas ekonomi Indonesia. Sebagian telah memprediksi aset perbankan Islam mencapai 5 persen pada tahun 2008 tetapi data Bank Indonesia menunjukkan aset perbankan Islam hanya mencapai 2 persen pada tahun tersebut. (BI Islamic Banking Statistics January, 2009). Tahun 2011, aset perbankan Islam terhitung mencapai 4 persen dari seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia (BI Islamic Banking Statistics October, 2011).

## **2. Keuangan Islam di Sumatera Barat**

Ada sedikit bukti sejarah tentang keberadaan struktur keuangan Islam di Sumatera Barat. Prinsip-prinsip keuangan Islam kemungkinan pertama kali diterapkan dalam bentuk lembaga oleh Sarekat Usaha (SU), yang berdiri pada tahun 1914 oleh seorang tokoh Islam Modern dengan dukungan kelompok-kelompok dagang di Padang dan oleh cabang daerah Sarikat Islam (SI, yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam), yang dibentuk pada tahun 1916

oleh para saudagar dan petani di Padang sebagai usaha bersaing melawan para pedagang keturunan Tiongkok (Abdullah, 1972:228). Muhammadiyah cabang Sumatera Barat kemudian mendirikan departemen kesejahteraan sosial, yang bernama Penolong Kesejahteraan Umum, (PKU) pada tahun 1927 (Abdullah, 1971: 78).

Ide keuangan Islam, sebagai bagian dari ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dalam perdebatan tentang asal-usul ekonomi daerah setelah masa Soeharto. Keuangan syariah menjadi sebuah konsep penting sehingga harus menjadi rujukan bagi setiap program atau ide baru. Para publik figur menggunakan konsep ini sebagai motivasi, dan pembenaran, atas program ekonomi mereka, yang mereka sebut mendukung kebutuhan mayoritas penduduk. Dalam pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa, mereka terus menerus bersandar pada struktur keuangan Islam untuk menunjukkan mandat mereka, dan membantu kerjasama dengan, negara-negara Islam kaya dengan harapan menarik investasi alternatif di wilayah ini.

## **3. Wacana Publik Keuangan Islam**

Serangkaian istilah kunci muncul dalam pembahasan seputar keuangan Islam, termasuk istilah tanpa bunga, sektor

riil, bagi hasil, dan ekonomi syariah, yang membawahi semua istilah yang lainnya. Sebagai tambahan dari persyaratan bahwa sistem keuangan harus diselenggarakan dengan cara bagi hasil ketimbang bunga, ekonomi syariah menggambarkan adanya hubungan ekonomi di mana kekayaan dan kegiatan pendanaan untuk membantu orang miskin, dan masyarakat termotivasi oleh rasa solidaritas umum. Istilah ini sesuai dengan gagasan kewajiban moral dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, tetapi hal ini telah ditata ulang oleh para kelompok elit lokal untuk menjadi sebuah alat ideologi budaya dalam rangka memperluas jaringan dalam politik lokal dan membangun hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam. Bagi Romeo Rissal Pandjialam, kepala wilayah Bank Indonesia di Padang, keuangan Islam hanyalah satu bagian dari keseluruhan sistem keuangan Islam yang, jika diterapkan sepenuhnya, akan merubah kepemilikan sumber-sumber daya usaha besar dari beberapa perusahaan besar kepada ratusan orang. Jika hanya sebagian kecil perusahaan saja yang mengendalikan sumber daya ekonomi, maka masyarakat tidak akan benar-benar maju. Daya beli masyarakat tidak akan meningkat. Saya selalu mengambil contoh dari apa yang kami lakukan di Mandailing Natal (Sumatera Utara). Di masa lalu, perkebunan sawit

dikendalikan oleh beberapa pengusaha besar. Tetapi sekarang, ada lebih dari lima ribu kepala keluarga yang memiliki dua atau tiga hektar sawit. Mengapa hal serupa tidak dapat dilakukan di Sumatera Barat? Karena kita hanya mengamati dan tidak membantu masyarakat (Wawancara, Padang, 19 November 2010).

Dalam wacana publik di Sumatera Barat, konsep keuangan Islam dikaitkan pada identitas budaya masyarakat Minangkabau. Pendapat umum tentang keuangan Islam mengandalkan hubungannya dengan identitas daerah semata, dengan mengutip filsafat Minang bahwa adat dibentuk berdasarkan pada Syariah, dan Syariah berdasarkan kepada Al Quran (*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*). Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Fauzi Bahar, Walikota Padang, yaitu dengan filsafat masyarakat Minangkabau, bahwa '*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*', maka wajarlah bahwa konsep keuangan Islam adalah alat yang penting bagi kaum Muslim yang bermaksud membangun perekonomiannya (Padang Today, 7 Februari 2010).

Walaupun lembaga-lembaga keuangan Islam masih relatif baru di provinsi ini, pemegang kekuasaan di daerah tidak sabar menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki komitmen yang

panjang terhadap keuangan Islam. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim, hal ini tercermin dalam praktek-praktek bagi hasil yang sudah berlangsung lama. Keuangan Islam telah lama ada di Padang Pariaman. Sumatera Barat dapat menjadi pelopor dalam penerapan keuangan Islam. Pada kenyataannya, pada tingkat filosofi dan ideology, kami sudah melaksanakan keuangan Islam sejak semula, jauh sebelum pendirian Bank Islam pertama di Indonesia. Keuangan Islam bukanlah sebuah konsep yang asing di Sumatera Barat. Konsep bagi hasil mendasari pengaturan seperti paduon sapi (beternak sapi) dan paroan sawah (penanaman pagi). Keuangan Islam dapat diterapkan di Sumatera Barat karena wilayah ini memiliki filsafat bahwa '*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*' (Padang Today, 27 September 2009).

Dengan menarik garis parallel antara praktek keuangan Islam dalam bentuk tradisional dan modern, Muslim Kasim mendorong masyarakat Sumatera Barat untuk menjadikan provinsi ini pelopor keuangan Islam di Indonesia. Hubungan antara keuangan Islam dan keteguhan masyarakat Minangkabau terhadap warisan budaya Muslim mereka tercermin dalam beberapa hal yang berbeda: sebagai bukti kereligiusan provinsi ini,

sebagai bukti sambutan terhadap sistem keuangan Islam, dan sebagai sebuah cara untuk mendorong warga Sumatera Barat menerapkan praktek-praktek yang berhubungan dengan keuangan Islam. Sebuah contoh adalah pernyataan oleh Devvyzal, kepala Bank Islam Nagari, telah melakukan pengamatan sebagai berikut: 'kenyataan bahwa warga Minang 99 persen adalah Muslim, memungkinkan konsep keuangan Islam berkembang' (Posmetro Padang, 17 Januari 2009).

Sebuah contoh bagaimana warisan budaya dikemukakan dalam rangka mendukung keuangan Islam terdapat dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Gamawan Fauzi, mantan Gubernur Sumatera Barat, yang menekankan pada daya tarik keuangan Islam dan alasan penerapannya di provinsi ini: Pertumbuhan perbankan Islam di Sumatera Barat seharusnya lebih tinggi daripada daerah manapun di Indonesia karena filsafat yang berbunyi '*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*' (Padang Ekspres, 20 Maret 2009)

Dalam sebuah contoh seruan agar masyarakat Sumatera Barat merangkul praktek-praktek yang berkaitan dengan keuangan Islam, Romeo Rissal Pandjialam, kepala wilayah Bank Indonesia di Padang, memberikan komentar berikut: Sangatlah ironis bahwa Sumatera Barat, dengan



(filsafatnya) '*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*' tidak didukung oleh sistem keuangan Islam (Padang Today, 7 Februari 2010).

Alasan utama yang kedua yang dikemukakan dalam penjelasan tentang keuntungan sistem keuangan Islam adalah stabilitas yang ditawarkan di masa-masa sulit. Menurut Romeo, 'sistem ekonomi konvensional terlihat kuat dari luar. Akan tetapi, saat angin bertiup atau timbul masalah, mereka sangat rentan terhadap kehancuran' (Padang Today, 7 Februari 2010). Atau sebagaimana Fauzi Bahar, Walikota Padang, ungkapkan, 'sebuah sistem keuangan Islam sangat efektif, aman dan meyakinkan' (Padang Today, 7 Februari 2010). Beberapa komentator bahkan lebih jauh lagi mengatakan bahwa keuangan Islam adalah jawaban bagi masalah keuangan dunia. Dalam sebuah ungkapan Muhammad Ali, salah satu Direktur Jenderal di Kementerian Agama, 'konsep keuangan Islam menawarkan solusi bagi perbaikan ekonomi dunia, yang saat ini sedang menghadapi krisis global' (Posmetro Padang, 28 Maret 2009). Menurut Muslim Kasim, fakta ini telah dikenali dengan Sistem keuangan Islam telah ditiru oleh banyak pihak luar. Wilayah-wilayah dengan mayoritas non-Muslim seperti Bali telah menerapkan prinsip-

prinsip keuangan Islam. Saat ini negara-negara Barat juga telah membangun sistem keuangan Islam. Hampir 70 persen negara di Eropa dan Amerika telah memilikinya. (Padang Today, 27 September 2009).

Para tokoh masyarakat juga menggunakan pernyataan umum mereka untuk menguraikan bagaimana ekonomi yang demikian dapat menguntungkan masyarakat Sumatera Barat. Lembaga-lembaga yang paling sering dijadikan rujukan adalah lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti bank-bank Islam dan unit-unit Islam dalam bank-bank konvensional, lembaga-lembaga keuangan mikro Islam, BMT, dan yang kurang umum adalah takaful. Lembaga-lembaga lain yang terkait dengan keuangan Islam dalam wacana umum adalah zakat dan sistem produksi Islam. Alasan yang paling sering dikutip untuk stabilitas sistem keuangan Islam adalah bahwa mereka berfokus pada ekonomi sektor riil, menghindari spekulasi dan transaksi keuangan beresiko tinggi. Sebagaimana Faisal Rivai, kepala Masyarakat Keuangan Islam Nasional mengungkapkan, 'keuntungan keuangan Islam mulai dari sektor riil, khususnya dari perusahaan-perusahaan mikro, kecil, dan menengah' (Padang Today, 7 Februari 2010).

Aspek inilah yang ditekankan oleh para pemegang kekuasaan ketika mereka

menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan Islam yang lebih menyeluruh akan meningkatkan pembangunan daerah. Menurut Firdaus K., Sekretaris pembangunan ekonomi daerah' (Posmetro Padang, 28 Maret 2009). Romeo Rissal Pandjialam, kepala kantor wilayah Bank Indonesia, setuju dengan pengamatan ini. Keuangan Islam sangat penting bagi pembangunan wilayah, dan khususnya untuk perbaikan ekonomi daerah setelah bencana gempa bumi 2009. Keuangan Islam menawarkan kesempatan yang sangat penting saat ini (Posmetro Padang, 26 November 2009).

Dalam kesempatan berbeda, dia berkesempatan memberikan contoh konkrit tentang manfaat praktek keuangan Islam di Sumatera Barat, menggunakannya untuk menggambarkan sebuah kunci yang menggaribawahi prinsip-prinsip perdagangan keuangan Islam, yaitu pendistribusian hasil: Saya sangat terkesan bahwa ada sebuah perusahaan teh di dekat Gunung Kerinci yang telah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Saat harga ekspor teh meningkat, mereka otomatis menaikkan harga yang mereka bayarkan kepada para petani teh, walaupun mereka bias saja mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya bertanya mengapa mereka berbuat demikian,

dan mereka menjawab, 'Masyarakat juga menyumbang pada pertumbuhan perusahaan'. Maka, keuntungan haruslah dibagi. Inilah konsep nyata dari keuangan Islam (Padang Ekspres, 29 April 2010).

Sebuah bagian kunci dari strategi dalam menerapkan elemen keuangan Islam dalam rangka mendorong pembangunan daerah adalah perannya dalam meningkatkan kesempatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Islam. Sebagaimana Marwan Zein, seorang jurnalis yang sekarang tinggal di Jakarta, mengamati, ada pasar yang berarti bagi barang konsumsi di Timur Tengah, sebuah pasar yang mana pemasok Muslim dapat meraih manfaat produk sertifikat uang syariah bisa diekspor ke negara-negara Timur tengah. Negara-negara Timur tengah adalah sebuah pasar ekonomi. Di Saudi Arabia terdapat produk sajadah yang dibuat di China. Saya juga melihat paket Korma dari Amerika yang bersaing dengan korma dari Iraq, Mesir dan Saudi Arabia (*Singgalang*, 18 September 2008).

Menurut sebagian, terlihat sesuai dengan nilai-nilai Islam sangat penting untuk bahan promosi Sumatera barat sebagai daerah tujuan wisata. Secara khusus hal ini disampaikan oleh Romeo dalam rangka mendorong turis Muslim dari negara-negara Islam untuk berkunjung ke provinsi ini. Ketika saya bertemu dan

berbicara dengan turis dari Timur Tengah di Malaysia dan bertanya kepada mereka kenapa mereka tidak datang ke Sumatera Barat yang memiliki alam yang indah. Jawaban yang mereka berikan membuat saya terkejut. Sumatera Barat adalah daerah sekuler, menurut salah satu turis yang nenek moyangnya berasal dari Magek Kabupaten Agam, Sumatera Barat sendiri.

Mungkin yang paling penting dari wacana keuangan Islam di Sumatera Barat adalah ketika keuangan Islam dilihat sebagai alat untuk menarik investasi dari Timur Tengah. Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua DPRD Padang (sekarang walikota Padang) dan anggota PKS mengulang pernyataan Hidayat Nurwahid ketika berkomentar di harian lokal Sudah waktunya bagi Indonesia untuk menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah yang mengambil manfaat secara finansial dari krisis keuangan di Amerika. Terdapat banyak uang di Timur Tengah. Krisis keuangan di Amerika Serikat juga berpengaruh ke Eropa. Sehingga Indonesia memiliki kesempatan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menarik dana dari Timur Tengah (*Singgalang*, 20 October 2008).

Syafrudin Karimi, dosen Universitas Andalas Padang, melangkah lebih jauh dengan argumen bahwa kolaborasi lintas

negara terutama dengan negara Malaysia dapat menjadi alat untuk perkembangan lembaga keuangan Islam di Sumatera Barat. Perkembangan sistem keuangan Islam bisa dilengkapi dengan pembuatan aturan kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah dan Malaysia yang sudah lama mempraktekkan konsep hukum Islam (*Postmetro Padang*, 28 March 2009).

Pernyataan akhir tentang tema dalam pernyataan publik tentang keuangan Islam di Sumatera Barat adalah dikaitkan dengan meningkatnya aset lembaga keuangan Islam dan manfaat lembaga tersebut bagi masyarakat kecil. Kata kata *menjanjikan, meningkat, menggembirakan* adalah kata-kata yang sering digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan lembaga keuangan Islam. Firdaus K., sebagai contoh menjelaskan bahwa perkembangan keuangan Islam di daerah ini sangat menjanjikan. Perkembangan ini dapat dibuktikan pada lembaga bank konvensional yang membuka unit Bank Islam (*Posmetro Padang*, 28 March 2009).

Menurut Nelly Sumarni, kepala Asosiasi Bank Islam Indonesia provinsi Sumatera Barat, 'cepatnya pertumbuhan bank Islam merupakan bukti bahwa bank Islam adalah lembaga keuangan yang menjanjikan' (*Padang Ekspres*, 27 February 2010). Beberapa bulan kemudian, Romeo mencatat bahwa

unit bank islam BRI telah meningkatkan asetnya secara tinggi dalam waktu 10 bulan terakhir...karena bank tersebut betul-betul mencapai masyarakat kecil....bank Islam beroperasi dalam kepercayaan bahwa masyarakat Minang adalah masyarakat yang Muslim yang tunduk kepada hukum Islam. Sampai saat ini, bank konvensional di Sumatera Barat hanya fokus kepada kelompok bisnis menengah ke atas (*Padang Ekspres*, 30 July 2010).

Dia selanjutnya menjelaskan bahwa banyak pengusaha kecil dan menengah menderita karena mereka tidak memiliki modal. Ketika mereka datang ke bank konvensional, mereka dianggap kelompok yang tidak masuk kategori orang yang layak dapat pinjaman karena mereka tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman. Sebagian kecil yang mendapatkan pinjaman dituntut untuk membayar dengan bunga yang tinggi (*Padang Ekspres*, 30 July 2010).

Seperti Romeo, banyak tokoh masyarakat yang menunjukkan manfaat lembaga keuangan Islam bagi masyarakat pada setiap level. Menurut Fauzi Bahar, Walikota Padang, persoalan yang dihadapi kelompok usaha menengah adalah kesulitan dalam usaha mendapatkan pinjaman. Sebagai akibatnya, mereka terpaksa meminjam kepada rentenir. Jika lembaga

keuangan Islam ada, kelompok usaha menengah akan mendapatkan manfaat yang banyak (*Padang Ekspres*, 7 May 2010).

Dua tahun sebelumnya, Ahmad Wira, dosen di IAIN Imam Bonjol Padang telah menjelaskan harapan bahwa bermunculannya lembaga keuangan mikro syariah akan memperluas pendistribusian dana-dana pemerintah daerah dan bantuan-bantuan keuangan lainnya kepada masyarakat dari pemerintah (*Padang Today*, 17 December 2008). Pada saat yang sama, Mardius Asmaan, Kepala Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LKAAM, di kabupaten agam menyebutkan kehadiran BMT membantu keluarga miskin dalam mendapatkan akses keuangan (*Singgalang*, 31 December 2008).

## **KESIMPULAN**

Peningkatan perkembangan keuangan Islam sejak krisis minyak pada tahun 1970-an, sebagai sumber kesejahteraan di berbagai bagian dunia Arab telah memfasilitasi penyebaran sistem keuangan Islam dari negara Arab ke berbagai negara Muslim. Di Sumatera Barat, publik figur memanfaatkan wacana dan praktek keuangan Islam sebagian sebagai alat untuk memindahkan sumber daya keuangan dari para konglomerat besar kepada pelaku ekonomi menengah. Publik figur daerah

juga menggunakan sistem keuangan Islam untuk menunjukkan kredensial dengan sistem keuangan Islam, memfasilitasi deal ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah dengan harapan dapat menarik investor dari wilayah tersebut ke Sumatera Barat.

#### KEPUSTAKAAN ACUAN

Abdullah, Taufik. 1971. *Schools and politics: The Kaum Muda movement in West Sumatra, (1927-1933)*. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University.

----- . 1972. *Modernisation in the Minangkabau World: West Sumatra in the early decades of the twentieth century*. In *Culture and politics in Indonesia*, ed. Claire Holt, 179-243. Ithaca: Cornell University Press.

Antonio, M. S. (2008) 'Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium Sized Enterprises', in Fealy, G. and White, S. (eds) *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS.

Ariff, M. (1988) 'Resource Mobilization Through the Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia', in Ariff, M. (ed.) *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*, Singapore: ISEAS.

Billah, M.M. (2007) 'Islamic Banking and the Growth of Takaful', in Lewis, M.K. and Hassan, M.K. (eds) *Handbook of Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.

Dobbin, Christine. 1983. *Islamic revivalism in a changing peasant economy: Central Sumatra, 1784-1847*. London: Curzon Press.

Fairclough, N. (1989) *Language and Power*, London: Longman.

— — (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. London; New York: Longman.

Hefner, Robert W. 1996. *Islamizing capitalism: on the founding of Indonesia's first islamic banking*. In *Toward a new paradigm: recent development in Indonesian islamic thought*, ed. Woodward. Arizona: Arizona State University.

Juoro, U. (2008) 'The Development of Islamic Banking in the Post-crisis Indonesian Economy', in Fealy, G. and White, S. (eds) *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS.

Kuran, T. (1995) 'Islamic Economics and the Islamic Subeconomy', *The Journal of Economic Perspectives* 9 (4): 155-173.

- \_\_(1997) 'The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity', *Social Research* 64 (2): 301-339.
- Lubis, N.A.F. (2004) 'Financial Activism among Indonesian Muslims', in Hooker, V. and Saikal, A. (eds) *Islamic Perspectives on the New Millenium*, Singapore: ISEAS.
- Saeed, A. (1999) 'Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context', in Lindsey, T. (ed.) *Indonesia Law and Society*, Leichhardt, NSW: Federation Press.
- Verdasco, A.M. (2006) *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*, Singapore: World Scientific Publishing.